

# EKOTRANS

## Artikel

- \* Potensi, Permasalahan, Tantangan dan Strategi Pembangunan Pertanian ke Depan
- \* Prinsip Perkuliahan Efektif, Bagaimana Peran Dosen

## Penelitian

- \* MisPriced Put Option and Risk Neutral Portfolio
- \* Implikasi Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Hasil Pemekaran Wilayah di Kabupaten Dharmasraya
- \* Meningkatkan Kemampuan Berbicara Siswa Melalui Simulasi pada Kelas 10.2 Jurusan Perjalanan Wisata SMK Nusatama Padang
- \* Uji Pemakaian Pupuk Cair *Tithonia diversifolia* pada Tanaman Kacang Panjang (*Vigna sinensis* L.)

Jurnal Ilmiah

# EKOTRANS

## Artikel

- \* Potensi, Permasalahan, Tantangan dan Strategi Pembangunan Pertanian ke Depan
- \* Prinsip Perkuliahan Efektif, Bagaimana Peran Dosen?

## Penelitian

- \* MisPriced Put Option and Risk Neutral Portfolio
- \* Implikasi Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Hasil Pemekaran Wilayah di Kabupaten Dharmasraya
- \* Meningkatkan Kemampuan Berbicara Siswa Melalui Simulasi pada Kelas 10.2 Jurusan Perjalanan Wisata SMK Nusatama Padang
- \* Uji Pemakaian Pupuk Cair *Tithonia diversifolia* pada Tanaman Kacang Panjang (*Vigna sinensis* L.)



**Diterbitkan :**

**Pusat Studi Ekonomi dan Sosial**

**Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat**

**Universitas Ekasakti**

**PADANG**

**EKOTRANS**

Diterbitkan oleh Pusat Studi Ekonomi dan Sosial Universitas Ekasakti (UNES) Padang dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pengkajian ekonomi dan sosial. Jurnal ini berisikan tentang perkembangan teoritik, artikel ilmiah, dan hasil penelitian. Redaksi mengundang para pakar, para praktisi dan siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis, sambil berkomunikasi dengan masyarakat luas. Tulisan dalam Ekotrans tidak harus mencerminkan pandangan/ pendapat.

Redaksi	
Pelindung	: Prof.Dr.H.Andi Mustari Pide, SH.
Pemimpin Umum	: Tarma Sartima
Wakil Pemimpin Umum	: Syaiful Ardi
Ketua Penyunting	: Tarma Sartima
Wakil Ketua Penyunting	: Listiana Sri Mulatsih
Penyunting Pelaksana	: Ruslan Ismail Mage
Anggota Penyunting	: Dina Adawiyah, Tety Chandra, Irmayani, Salfadri, dan Caterina Lo.
Penyunting Ahli	: Dr. Ungsi AOM Dr. Agussalim, SE.,MS Dr. Agus Sutardjo, SE.,M.Si Dr. Darmini Roza,SH.,M.Hum

**Alamat Redaksi dan Tata Usaha :**  
Jl. Veteran dalam No. 26 Padang 25113  
Phone (0751) 28859 Fax (0751) 32694  
e-mail : unes-aa@plasa.com.

**Jurnal Ilmiah Ekotrans**  
Diterbitkan secara berkala 2 kali setahun  
Oleh  
Pusat Studi Ekonomi dan Sosial  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Universitas Ekasakti  
PADANG

Terbit pertama kali Januari 2001  
Frekuensi terbit 2 kali setahun : Januari dan Juli

## Daftar Isi

## Salam Redaksi

## Artikel

- Potensi, Permasalahan, Tantangan dan Strategi Pembangunan Pertanian  
Kedepan Oleh : I Ketut Budaraga (Hal. 1 - 17)
- Prinsip Perkuliahan Efektif, Bagaimana Peran dosen?  
Oleh : Salman M. Noer (Hal. 18 - 22)
- Manfaat Manajemen Operasi Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota  
Padang Oleh : Fera Mutia (Hal. 23 - 35)
- Dampak Terjadinya Peperangan Libya dengan Amerika dan Sekutu terhadap  
Ekonomi Global Oleh : Devi Anita (Hal. 36 - 39)

## Laporan Penelitian

- MisPriced Put Option and Risk Neutral Portfolio  
Oleh : Laela Susdiani (Hal. 40 - 47)
- Implikasi Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Hasil Pemekaran  
Wilayah di Kabupaten Dharmasraya  
Oleh : Andi Fitriadi Amdar (Hal. 48 - 59)
- Meningkatkan Kemampuan Berbicara Siswa Melalui Simulasi pada Kelas  
10.2 Jurusan Perjalanan Wisata SMK Nusatama Padang  
Oleh : Asril (Hal. 60 - 69)
- Implementasi dalam Kebijakan Menanggulangi Kemiskinan dengan Program  
Raskin ( Studi Empiris di Desa Pongkar Kabupaten Karimun )  
Oleh : M . Rosmansyah (Hal. 70 - 84)
- Aplikasi Metode Matrik pada Perancangan Campuran Agregat Kelas A  
Oleh : Sjelly Haniza (Hal. 85 - 94)
- Analisis Kontemporer Permasalahan Pendidikan Anak Usia Dini dalam  
Masyarakat Indonesia Oleh: Syafnan (Hal. 95 - 108)
- Kewajiban dan Hak antara Pasien dengan Rumah Sakit dalam Perspektif  
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit  
Oleh : Supeno (Hal. 109 - 125)
- Uji Pemakaian Pupuk Cair *Tithonia diversifolia* pada Tanaman Kacang Panjang  
(*Vigna sinensis* L.) Oleh : Syamsuwirman (Hal. 126 - 136)
- Analisis Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di Nagari  
Pakandangan Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman  
dalam PNPM Mandiri Pedesaan  
Oleh : Usnimar (Hal. 137 - 148)
- Modifikasi Sabut Pinang untuk Penyerapan Ion Logam Tembaga dalam  
Jumlah Runut Oleh : Eliyarti (Hal. 149 - 161)
- Pedoman Penulisan Jurnal Ekotrans (Hal. 162)

## Potensi, Permasalahan, Tantangan dan Strategi Pembangunan Pertanian Kedepan

I Ketut Budaraga

Dekan dan Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Ekasakti Padang

### Abstract

*Indonesia has abundant natural resources, including germplasm, besides having the potential availability of land large enough and has not been used optimally. The high number of residents who are mostly located in rural areas and has a culture, hard work, is actually a potential workforce to support agricultural development. There is now quite widely available appropriate technology packages that can be used by farmers to improve productivity, quality and production capacity of various agricultural products. Fundamental problems facing the agricultural sector at present and the future is the increasing environmental degradation and global climate change; limited availability of infrastructure, facilities, land and water, at least the status and the small area of land ownership; weak seed systems and national perbibitan; farmers' limited access to capital and high interest rates of farm; weak institutional capacity and the farmers and extension workers; still fragility of food security and energy security; yet diversified food goes well; low Farmers Exchange (NTP), and yet padunya between sectors in supporting agricultural development. Agricultural development to the front face many challenges related to production and productivity, the use of chemical and organic fertilizers in a balanced way, land and water infrastructure, seed / perbibitan, finance, food needs, the Millennium Development Goals (MDGs), pricing policy, institutional, productive economic activities outreach, education, agricultural imagery, and global competition. In the future, strategies that increase productivity and efficiency must be developed through the application of new technology, which is generated through a long journey of research and development (R and D), as well as research for development (R for D). The business community and the private sector in Indonesia in general need to implement a real strategic partnership with high peguruan and food research centers, which in fact is in all corners of Indonesia. Only the R-and-D and R-for-D is, the new innovation will be created, so it will increase the competitiveness Indonesia many times. The business or the private sector can also to be a leading actor in developing diversification, especially those based on the use of technology and food industry. Diversification based on local wisdom and culture will be very compatible with the strategy of a balanced nutritional needs according to the demographic conditions of heterogeneous pluralistic Indonesia. In this case, the step of technology development and content tailored to the food industry resource, institutional and local culture.*

*Key words: Potential, Problems, Challenges, Strategy, Development, Agriculture*

## 1. Pendahuluan

### Kondisi Umum

Sektor pertanian memperlihatkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang menggembarakan. Selama 2005-2009, pertumbuhan PDB pertanian (di luar perikanan dan kehutanan) memperlihatkan kenaikan setiap tahunnya yaitu rata-rata 3,30%.

Dari besarnya angka tenaga kerja, pertanian masih tetap menjadi sektor andalan mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Besarnya angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian tentu saja memberatkan pertanian primer sehingga diperlukan upaya keras untuk mendorong perpindahan tenaga kerja pertanian primer ke sektor industri pertanian atau non pertanian. Jumlah tenaga kerja pertanian (pertanian, perikanan, dan kehutanan) berada pada kisaran 40% dari angkatan kerja nasional dan cenderung terus meningkat setiap tahunnya selama periode 2005-2009

## 2 Potensi, Permasalahan dan Tantangan

### 2.1 Potensi Pertanian Indonesia

#### 2.1.1 Keanekaragaman Hayati dan Agroekosistem

Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah (*mega biodiversity*), termasuk plasma nutfah. *Bio-diversity* darat Indonesia merupakan terbesar nomor dua di dunia setelah Brasil, sedangkan bila termasuk kelautan maka Indonesia nomor satu dunia. Keaneka ragaman hayati yang didukung dengan sebaran kondisi geografis, berupa dataran rendah dan tinggi serta limpahan sinar matahari, intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah, serta keaneka ragaman jenis tanah memungkinkan dibudidayakannya aneka jenis tanaman dan ternak asli daerah tropis maupun komoditas introduksi dari daerah sub tropis secara merata sepanjang tahun di Indonesia. Aneka ragam dan besarnya jumlah plasma nutfah tanaman dan hewan yang sudah beradaptasi dengan iklim tropis merupakan sumber materi genetik yang dapat direkayasa untuk menghasilkan varietas dan klon tanaman unggul serta bangsa Ternak. Hal ini dapat dilihat dengan beragamnya jenis komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang sudah sejak lama diusahakan sebagai sumber pangan dan pendapatan masyarakat.

#### 2.1.2 Lahan Pertanian

Indonesia memiliki potensi ketersediaan lahan yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagian lahan potensi tersebut merupakan lahan sub optimal seperti lahan kering, rawa, lebak, pasang surut dan gambut yang produktivitasnya relatif rendah, karena kendala kekurangan dan kelebihan air, tingginya kemasaman/salinitas, jenis tanah yang kurang subur serta keberadaan lahan di daerah lereng dataran menengah dan tinggi. Namun apabila keberadaan lahan sub optimal tersebut dapat direkayasa dengan penerapan inovasi teknologi budidaya dan dukungan infrastruktur jalan dan irigasi, maka lahan tersebut dapat dirubah menjadi lahan-lahan produktif. Di samping itu dapat pula dilakukan perluasan areal tanam melalui peningkatan intensitas pertanaman (IP) pada lahan subur beririgasi dengan varietas unggul baru umur super ultra genjah. Potensi tersebut merupakan peluang bagi peningkatan produksi tanaman dan ternak apabila dapat dirancang dengan baik pemanfaatannya. Jumlah luasan dan sebaran hutan, sungai, rawa dan danau serta curah hujan yang cukup tinggi sesungguhnya merupakan potensi alamiah untuk memenuhi kebutuhan air pertanian apabila dikelola dengan baik. Waduk, bendungan, pengembangan usaha pertanian, baik di lahan subur maupun lahan-lahan sub optimal.

Dari luas daratan Indonesia, terdapat sekitar 94,1 juta ha lahan yang sesuai untuk pertanian tanpa mengganggu keseimbangan ekologis daerah aliran sungai, sedangkan yang sudah dijadikan lahan pertanian baru sekitar 63,7 juta ha. Dengan demikian masih terbuka peluang untuk perluasan areal pertanian sekitar 30,4 juta hektar dengan 24 juta ha diantaranya merupakan lahan subur untuk persawahan, perkebunan dan pengembangan komoditas lain, sedangkan 6,4 juta ha lainnya merupakan sawah pasang surut, lebak dan gambut yang masih memerlukan inovasi khusus. Di samping itu, hingga saat ini lahan pertanian terlantar jumlahnya cukup luas, yaitu sekitar 12,4 juta hektar.

### 1.2.1.3 Tenaga Kerja Pertanian

Tingginya jumlah penduduk yang sebagian besar berada di pedesaan dan memiliki kultur budaya kerja keras, sesungguhnya merupakan potensi tenaga kerja untuk mendukung pengembangan pertanian. Hingga saat ini lebih dari 43 juta tenaga kerja masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Namun besarnya jumlah penduduk tersebut belum tersebar secara proporsional sesuai dengan sebaran luas potensi lahan serta belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mendukung pengembangan pertanian yang berdaya saing. Apabila keberadaan penduduk yang besar di suatu wilayah dapat ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk dapat berkerja dan berusaha di sector produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, maka penduduk Indonesia yang ada dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi aneka komoditas bagi pemenuhan kebutuhan pasar nasional dan dunia. Masih terdapat cukup potensi meningkatkan kapasitas aneka produksi komoditas pertanian melalui penempatan tenaga kerja terlatih di daerah yang masih kurang penduduknya dengan didukung oleh stimulus dalam bentuk penyediaan faktor produksi, bimbingan teknologi serta pemberian jaminan pasar yang baik.

### 2.1.4 Teknologi

Sesungguhnya saat ini sudah cukup banyak tersedia paket teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh petani untuk meningkatkan produktifitas, kualitas dan kapasitas produksi aneka produk pertanian. Berbagai varietas, klon dan bangsa ternak berdaya produksi tinggi; berbagai teknologi produksi pupuk dan produk bio; alat dan mesin pertanian; serta aneka teknologi budidaya, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian sudah cukup banyak dihasilkan para peneliti di lembaga penelitian maupun yang dihasilkan oleh masyarakat petani. Beberapa keberhasilan alih teknologi di sektor pertanian melalui program PRIMA TANI, SLPTT, P2BN, telah mampu menggiatkan kegiatan agribisnis spesifik lokasi. Namun demikian aneka paket teknologi ini masih belum sepenuhnya dapat diadopsi oleh masyarakat petani, karena berbagai keterbatasan yang dihadapi dan dimiliki petani seperti: proses diseminasi, kelembagaan dan skala usaha, keterampilan serta tingginya biaya untuk menerapkan teknologi.

### 2.1.5 Pasar dan Pertumbuhan Jumlah serta Daya Beli Penduduk

Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar merupakan pasar dalam negeri yang potensial bagi produk-produk pertanian yang dihasilkan petani. Pada tahun 2009 jumlah penduduk Indonesia tercatat sebesar 230.632.700 jiwa dengan pertumbuhan 1,25 persen per tahun. Saat ini, tingkat konsumsi aneka produk hasil pertanian Indonesia, kecuali beras, gula dan minyak goreng, masih relatif rendah. Rendahnya tingkat konsumsi produk pertanian ini, terutama disebabkan masih

rendahnya tingkat pendapatan per kapita penduduk Indonesia sehingga mempengaruhi daya beli. Seiring dengan keberhasilan pembangunan ekonomi yang saat ini tengah giat dijalankan, maka pendapatan per kapita penduduk juga akan meningkat. Peningkatan pendapatan di satu sisi, maka diharapkan juga terjadi peningkatan permintaan produk pertanian di sisi lain. Permintaan pasar domestik, di samping jumlahnya yang semakin meningkat, juga membutuhkan keragaman produk yang bervariasi, sehingga akan membuka peluang yang lebih besar terhadap diversifikasi produk. Sejalan dengan era globalisasi dan pemberlakuan pasar bebas, produk pertanian Indonesia juga berpeluang untuk dipasarkan ke pasar internasional, baik produk segar maupun olahan. Apabila peluang pasar dalam negeri dan luar negeri dapat dimanfaatkan dengan berbasis pada keunggulan komparatif dan kompetitif, maka hal ini akan menjadi pasar yang sangat besar bagi produk pertanian Indonesia.

## 2.2 Permasalahan

Persoalan mendasar yang dihadapi sektor pertanian pada saat ini dan di masa yang akan datang adalah meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global; terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; sedikitnya status dan kecilnya luas kepemilikan lahan; lemahnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional; keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani; lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh; masih rawannya ketahanan pangan dan ketahanan energi; belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik; rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP), dan belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian. Jadi Permasalahan Mendasar Sektor Pertanian

1. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global
2. Ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air
3. Status dan luas kepemilikan lahan (9,55 juta KK < 0.5 Ha)
4. Lemahnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional
5. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani
6. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh
7. Masih rawannya ketahanan pangan dan ketahanan energi
8. Belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik
9. Rendahnya nilai tukar petani (NTP)
10. Belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian
11. Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian.

### 2.2.1 Dampak Perubahan Iklim Terhadap Penurunan Produksi Pertanian

Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut, peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Sejak tahun 1998 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat celsius, sehingga diprediksi akan terjadi lebih banyak curah hujan dengan perubahan 2-3 persen per tahun. Dalam 5 tahun terakhir rata-rata luas lahan sawah yang terkena banjir dan kekeringan masing-masing sebesar 29.743 Ha terkena banjir (11.043 Ha diantaranya puso karena banjir) dan 82.472 Ha terkena kekeringan (8.497 Ha diantaranya puso karena kekeringan). Kondisi ini kecenderungannya akan terus meningkat pada tahun-tahun ke



depan. Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian.

### 2.2.2 Terbatasnya Infrastruktur, Sarana Prasarana, Lahan dan Air Pertanian

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini keberadaannya sangat memprihatinkan adalah jaringan irigasi. Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan sumberdaya alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usaha tani. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai; pemeliharaan jaringan irigasi pedesaan; pengembangan sumber-sumber air alternatif dan berskala kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan bawah tanah; pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan serta pemanfaatan sumber air tanah, danau, rawa dan air hujan. Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan pergudangan berpendingin udara, laboratorium dan kebun percobaan bagi penelitian, laboratorium pelayanan uji standar dan mutu, pos dan laboratorium perkarantina, kebun dan kandang untuk penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman dan hewan, balai informasi dan promosi pertanian, balai-balai penyuluhan serta pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas.

Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani ini dalam jumlah yang cukup, berada dekat dengan sentra produksi, dan biaya pelayanan yang terjangkau. Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani, serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi. Belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra produksi mengakibatkan harga benih/bibit menjadi mahal, bahkan mengakibatkan banyak beredarnya benih/bibit palsu di masyarakat yang pada akhirnya sangat merugikan petani.

Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi. Sistem distribusi yang belum baik serta margin harga dunia yang relatif tinggi dibandingkan dengan harga pasar domestik mengakibatkan banyak terjadinya praktek penyelundupan pupuk bersubsidi ke luar negeri. Dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia, ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri, sebagai pupuk alternatif juga masih sangat kurang.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu, menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman/hewan yang ramah lingkungan.

### 2.2.3 Lemahnya Status dan Kecilnya Luas Penguasaan Lahan serta Tekanan Degradasi dan Alih Fungsi Lahan

Dari sisi skala penguasaan lahan, ternyata sejak tahun 1993, jumlah rumah tangga petani gurem yang kepemilikan lahannya kurang dari 0,5 hektar meningkat dari 10,9 juta rumah tangga menjadi 13,7 juta rumah tangga pada tahun 2003 (Sensus Pertanian 2003). Adapun rata-rata kepemilikan lahan petani di pedesaan sebesar 0,41 ha dan 0,96 ha masing-masing di Jawa dan Luar Jawa, dan dalam periode 1995 – 2007 rata-rata kepemilikan lahan cenderung menurun (PASEK, 2008). Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum serta terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan, khususnya untuk lahan beragroekosistem sawah dan lahan kering tanaman pangan. Di sisi lain, menurunnya rata-rata luas kepemilikan lahan diikuti pula dengan meningkatnya ketimpangan distribusi kepemilikan lahan khususnya untuk agroekosistem persawahan di Jawa.

Status penguasaan lahan oleh sebagian besar petani belum memiliki legalitas yang kuat dalam bentuk sertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha melalui perbankan. Hingga saat ini sertifikat tanah yang telah diterbitkan baru mencapai jumlah 24,5 juta persil atau sekitar 30% dari seluruh persil yang ada di Indonesia ( $\pm 75$  juta persil). Dari jumlah yang telah memperoleh sertifikat tersebut, 50% adalah tanah di perkotaan (pemukiman dan industri) yang luas arealnya tidak lebih dari 3 juta ha. Sedangkan lahan pertanian di pedesaan yang luasnya lebih dari 25 juta ha baru memperoleh sertifikat 50% dari seluruh sertifikat yang sudah diterbitkan atau  $\pm 12$  juta persil (HKTI, 2003).

Tantangan ke depan untuk mengatasi terbatasnya kepemilikan dan lemahnya status penguasaan lahan adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktifitas usaha tani, penataan kelembagaan pengelolaan lahan, pengendalian pertumbuhan penduduk, reformasi agraria serta penguatan status kepemilikan lahan. Revolusi hijau melalui penggunaan benih unggul produktivitas tinggi yang mensyaratkan penggunaan pupuk kimia dosis tinggi dan diabaikannya penggunaan pupuk organik telah mengakibatkan degradasi lahan yang menurunkan kapasitas produksi lahan pertanian. Kondisi ini semakin diperparah dengan menipisnya kearifan lokal dalam pengaturan pola tanam dan penggunaan pupuk organik. Struktur fisik dan kimia tanah di lahan pertanian, terutama lahan sawah menjadi masif dan kurang respon terhadap penggunaan input produksi, sehingga peningkatan produktifitas menjadi stagnan (*levelling off*) bahkan cenderung menurun. Tantangan ke depan untuk mengatasi dan mengantisipasi degradasi sumber daya lahan adalah bagaimana melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan secara teknis, dan biologis (vegetatif) melalui penerapan teknologi budidaya pertanian yang ramah lingkungan serta pengaturan dan pengendalian tata ruang kawasan.

Di sisi lain, pesatnya laju pembangunan nasional di berbagai bidang yang berbasis pada pemanfaatan sumberdaya lahan telah membawa implikasi terhadap pelanggaran tata ruang dan pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan. Otonomi daerah juga telah mendorong peningkatan laju pertumbuhan permintaan/pemanfaatan lahan multi sektoral yang semakin meningkat. Kondisi tersebut pada kenyataannya sulit diimbangi dengan penyediaan lahan, baik melalui pemanfaatan lahan pertanian yang ada maupun pembukaan lahan baru. Konversi sawah menjadi lahan non pertanian dari tahun 1999 – 2002 mencapai 563.159 ha atau 187.719,7 ha/tahun. Antara tahun 1981 – 1999, neraca pertambahan lahan sawah seluas 1,6 juta ha, namun antara tahun 1999 – 2002 terjadi pencurian luas lahan seluas 0,4 juta ha atau 141.285 ha/tahun. Data BPS tahun 2004 menunjukkan bahwa besaran laju alih fungsi lahan

pertanian dari lahan sawah ke non sawah sebesar 187.720 ha per tahun, dengan rincian alih fungsi ke non pertanian sebesar 110.164 ha per tahun dan alih fungsi ke pertanian lainnya sebesar 77.556 ha per tahun. Adapun alih fungsi lahan kering pertanian ke non pertanian sebesar 9.152 ha per tahun. Konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi merupakan salah satu bentuk kerugian investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usahatani serta turunya kesejahteraan petani sehingga kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak baginya.

Tantangan untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

#### 2.2.4 Sistem Perbenihan dan Perbibitan Nasional Belum Berjalan Optimal

Berdasarkan penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan benih/bibit unggul diakui telah menjadi satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi. Swasembada beras, jagung dan tebu yang telah dicapai selama ini, utamanya dikarenakan penggunaan benih unggul. Sampai saat ini, benih unggul banyak diimpor seperti padi hibrida, sayuran dan tanaman hias, serta bibit sapi. Untuk bibit sapi, belum ada satu lembaga perbibitan yang menonjol. Peran benih sebagai sarana utama agribisnis sangat penting. Agar usaha agribisnis dapat maju dan berkembang, maka sistem dan usaha perbenihan harus tangguh. Sistem perbenihan didukung oleh beberapa subsistem yang terdiri dari subsistem pengembangan varietas untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan selera masyarakat; subsistem produksi dan distribusi benih; subsistem perbaikan mutu melalui sertifikasi dan pelabelan; dan subsistem kelembagaan dan peningkatan SDM. Keberhasilan dalam menggerakkan seluruh komponen tersebut sangat dipengaruhi oleh komponen pendukung antara lain lembaga perbenihan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kebijakan pemerintah, system informasi, dan kesadaran konsumen dalam menggunakan benih bermutu. Saat ini, infrastruktur perbenihan sulit berkembang karena memerlukan investasi yang cukup besar. Tidak banyak swasta yang mau menanamkan investasi di perusahaan perbenihan/perbibitan. Di lain pihak, pemerintah sebagai pendorong kegiatan masyarakat juga kurang menunjukkan perhatian. Perlu ada upaya yang serius untuk membangkitkan kelembagaan perbenihan nasional mulai dari pusat sampai daerah, termasuk peningkatan kapasitas kemampuan penangkar benih lokal.

#### 2.2.5 Terbatasnya Akses Petani Terhadap Sumber Permodalan

Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan perusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan investasi. Di sisi lain petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan/lembaga keuangan formal, diantaranya akibatnya oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan, sehingga petani lebih memilih "rentenir" yang menyediakan pinjaman modal dengan cepat walau dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibanding lembaga keuangan formal. Kondisi ini, pada akhirnya semakin memperburuk kondisi arus tunai (*cash flow*) dan kesejahteraan petani.

Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal yang kebanyakan berada di daerah perkotaan dengan masyarakat petani yang tersebar di pedesaan. Sementara menunggu perbankan lebih berpihak kepada pertanian, maka pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok untuk menjadi cikal bakal lembaga keuangan mikro di pedesaan perlu dilakukan. Pada akhirnya lembaga ini diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani pedesaan. Namun pengembangan lembaga ini membutuhkan dukungan pemerintah dalam bentuk pembinaan manajemen dan *seed capital* kepada kelompok atau gabungan kelompok yang sudah benar-benar siap dirintis untuk tumbuh menjadi lembaga keuangan mikro di pedesaan.

#### 2.2.6 Lemahnya Kapasitas dan Kelembagaan Petani dan Penyuluh

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Di sisi lain, kelembagaan usaha yang ada di pedesaan, seperti koperasi belum dapat sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani/kelompok tani sebagai wadah pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Perhimpunan Petani Pemakai Air dan Subak dihadapkan pada tantangan ke depan untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan.

#### 2.2.7 Masih Rawannya Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi

Tercapainya swasembada komoditas pangan utama seperti padi dan jagung pada kenyataannya belum menjamin kemampuan individu di tingkat rumah tangga untuk dapat memperoleh bahan pangan dengan jumlah yang cukup. Kondisi ini bukan saja disebabkan lemahnya daya beli sebagian anggota masyarakat terhadap bahan pangan, tetapi juga dalam arti yang sebenarnya di beberapa daerah terpencil distribusi bahan pangan sulit dilakukan, terutama pada musim paceklik. Sulitnya memperoleh bahan pangan akibat kemiskinan tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga di pedesaan. Secara teknis dan sosial ekonomis penyebab menurunnya daya beli masyarakat terhadap pangan yang pernah terjadi adalah diakibatkan oleh gagal panen, akibat bencana alam, perubahan iklim maupun serangan hama dan penyakit maupun jatuhnya harga pasar produk yang dihasilkan petani. Di sebagian wilayah menurunnya daya beli petani terhadap pangan disebabkan oleh gagal panen atau anjoknya harga jual komoditas yang ditanam secara mono kultur.

Tantangan ke depan yang harus dihadapi adalah bagaimana membangun kelembagaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) masyarakat, terutama di daerah-daerah rawan pangan. Di samping itu pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan lumbung pangan, pola-pola integrasi komoditas, pengendalian hama terpadu maupun pengenalan iklim diharapkan dapat membantu masyarakat dari gagal panen yang dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan rumah tangga petani untuk memperoleh bahan pangan. Dengan makin terbatasnya ketersediaan energi dari fosil, maka harus dicarikan sumber energi alternatif lain. Dari hasil penelitian, beberapa tanaman, seperti kelapa sawit, jagung, ubi kayu, tebu, tanaman jarak dan kotoran

ternak dapat diolah menjadi sumber energi. Apabila energi sumber nabati ini dapat dikembangkan masyarakat terutama di pedesaan maka akan diciptakan masyarakat yang mandiri energy terutama untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga sehari-hari. Harus diakui bahwa sampai saat ini ongkos produksi energi terbarukan masih lebih mahal dibandingkan dengan energi fosil.

#### 2.2.8 Belum Berjalannya Diversifikasi Pangan dengan Baik

Harapan Pangan adalah hak asasi manusia yang paling mendasar, namun ketidakmampuan mengakses bahan pangan karena kemiskinan dan menurunnya daya beli masyarakat serta kurangnya pengetahuan keluarga terhadap konsumsi pangan dan gizi mengakibatkan belum tercapainya Pola Pangan Harapan (PPH) yang dicirikan dengan tingkat konsumsi energi, protein, lemak dan vitamin. Hingga saat ini konsumsi perkapita beras masih sangat tinggi, yaitu sekitar 139,15 kg/kapita/tahun. Dengan jumlah penduduk yang besar dan akan terus bertambah, maka dominasi beras dalam pola konsumsi pangan ini akan memberatkan upaya pemantapan pangan secara berkelanjutan di tingkat lokalita. Tantangan ke depan adalah bagaimana mendidik masyarakat untuk melakukan diversifikasi produksi dan konsumsi bahan pangan sesuai dengan skore PPH yang dicanangkan. Melalui tercapainya PPH diharapkan ketahanan pangan nasional akan dapat dicapai secara berkelanjutan. Di samping itu sumber daya alam yang tersedia dapat dikembangkan untuk mendorong komoditas pangan lain dan bahan baku industri yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta devisa negara.

#### 2.2.9 Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP)

Petani Indonesia pada umumnya tidak memiliki modal besar. Dengan usahatani berskala kecil dan subsisten, akses petani terhadap sumber permodalan menjadi terbatas. Kondisi ini ditambah dengan petani kurang memiliki fasilitas penyimpanan hasil pasca panen, sementara produk pertanian bersifat mudah rusak. Akibatnya banyak petani terlibat ke dalam sistem ijon dan/atau tengkulak. Meskipun hasil survei statistik menghasilkan perhitungan NTP di atas 100, dimana artinya penerimaan lebih besar dari pembelanjaan, tetapi nilai NTP saat ini masih sangat kecil untuk menyatakan bahwa kesejahteraan petani sudah baik.

#### 2.2.10 Tekanan Globalisasi Pasar dan Liberalisasi Perdagangan

Dinamika perubahan lingkungan strategis internasional, sektor pertanian dihadapkan kepada persaingan pasar yang semakin kompetitif. Dengan diratifikasinya beberapa kesepakatan internasional, telah memaksa setiap Negara membuka segala rintangan perdagangan dan investasi serta membuka eksporimpor seluas-luasnya. Hal tersebut akan mendorong persaingan pasar yang semakin ketat karena terjadinya integrasi pasar regional/internasional terhadap pasar domestik. Praktek perdagangan bebas yang cenderung menghilangkan perlakuan *non tariff barrier* telah berdampak besar terhadap sektor pertanian Indonesia, baik ditingkat mikro (usahatani) dan makro (nasional – kebijakan). Di tingkat mikro, liberalisasi perdagangan ini sangat terkait dengan efisiensi, produktifitas dan skala usaha. Sedangkan di tingkat makro, kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi petani produsen dan masyarakat konsumen. Pada kenyataannya kelompok negara maju lebih berhasil dalam mengamankan petaninya agar tetap bergairah berproduksi, sementara negara-negara berkembang relatif kurang berhasil memproteksi petani produsen dan masyarakat konsumen.

Tantangan ke depan yang harus dihadapi adalah bagaimana meningkatkan daya saing komoditas pertanian dengan karakteristik yang sesuai keinginan konsumen dan memiliki daya saing yang tinggi, baik pasar domestik, maupun pasar ekspor. Pengembangan daya saing dan ekspansi pasar komoditas ekspor tradisional harus lebih ditingkatkan, terutama pengembangan produk olahan. Di samping itu, pengembangan komoditas dan produk baru yang memiliki permintaan pasar yang tinggi juga harus dirintis.

### 2.2.11 Kuantitas dan Kualitas Produk Pertanian Belum Mendukung Berkembangnya Agroindustri

Upaya mewujudkan agroindustri yang berdaya saing dihadapkan pada permasalahan kurangnya kontinuitas pasokan bahan baku yang bermutu dan dalam jumlah yang sesuai kebutuhan kapasitas terpasang. Skala pengusahaan komoditas dalam skala yang kecil dan lokasinya tersebar, keragaman varietas/klon, penerapan teknologi budidaya dari pra panen sampai pasca panen yang beragam, waktu panen yang tidak sesuai dengan kapasitas kerja industri, keterbatasan sarana pergudangan yang dapat menjaga mutu produk serta jauh dan buruknya jalan distribusi dan sistem transportasi bahan baku kesemuanya merupakan factor penyebab agroindustri belum dapat beroperasi secara efisien.

Tantangan ke depan yang harus dihadapi adalah bagaimana mengembangkan budidaya komoditas di *on-farm* yang sesuai dengan prasyarat agroindustri skala besar, memperbaiki infrastruktur transportasi hingga ke sentra produksi, mengembangkan agroindustri skala kecil di pedesaan yang terintegrasi dalam pengembangan yang berskala kawasan. Di samping itu kerja sama antar kawasan untuk menumbuhkan agregat permintaan pasar dalam skala wilayah juga sangat diperlukan untuk mengembangkan agroindustri yang berlokasi di pusat-pusat pertumbuhan baru.

### 2.2.12 Minat Pemuda Terhadap Pertanian Semakin Menurun

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian, karena mereka yang berpendidikan rendah pada umumnya adalah petani yang tinggal di daerah pedesaan. Kondisi ini juga semakin diperparah dengan semakin berkurangnya upaya pendampingan dalam bentuk penyuluhan pertanian. Di sisi lain, bagi mereka yang telah mengenyam pendidikan formal tingkat menengah dan tinggi, melihat kemiskinan di pedesaan telah menjadikan mereka kurang tertarik lagi bekerja dan berusaha di sektor pertanian, sehingga mengakibatkan semakin tingginya urbanisasi ke perkotaan. Kondisi ini hanya dapat ditekan dengan mengembangkan agroindustri pertanian di pedesaan, karena dapat membuka peluang keterlibatan peran seluruh pelaku, termasuk memegang peranan penting dalam seluruh proses produksi usaha tani seperti penyediaan dan distribusi sarana produksi, usaha jasa pelayanan alat dan mesin pertanian, usaha industri pasca panen dan pengolahan hasil, usaha jasa transportasi hasil pertanian, pengelolaan lembaga keuangan mikro, konsultan manajemen agribisnis serta tenaga pemasaran produk agroindustri.

Tantangan ke depan yang harus dihadapi adalah bagaimana memberikan kesempatan yang lebih luas kepada kelompok yang masih termarginalisasi ini untuk dapat beraktivitas di sektor pertanian *off-farm*. Beberapa bidang usaha yang sangat terbuka untuk dikembangkan adalah usaha penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, usaha penangkaran bibit dan benih, perbengkelan alat dan mesin pertanian, pelayanan jasa alsintan, konsultan penyuluhan pertanian, analisis

kegiatan perbankan serta pengelolaan lembaga keuangan mikro di pedesaan. Kelompok pemuda dan wanita di pedesaan. Kelompok ini sesungguhnya

#### **2.2.13 Belum Padunya Antar Sektor dalam Menunjang Pembangunan Pertanian**

Pembangunan sektor tidak bisa berdiri sendiri, melainkan melibatkan banyak sektor terkait. Pertemuan koordinasi antar sektor sudah sering dilakukan, hanya saja mengintegrasikan secara fisik kegiatan antar sektor sangat sulit dilaksanakan. Hal ini karena memerlukan waktu dan tenaga untuk menelaah kegiatan antar sektor, wilayah, komoditas, dan waktu, sehingga tidak tumpang tindih. Kebijakan fiskal yang tidak berpihak kepada penumbuhan industri pengolahan pertanian di dalam negeri, misalnya, menyebabkan hilangnya kesempatan bangsa Indonesia untuk menambah pendapatan dan memperluas lapangan kerja.

#### **2.2.14 Kebijakan Fiskal dan Moneter Belum Mendukung Berkembangnya Usaha Pertanian**

Sektor pertanian telah berperan besar dalam pembentukan PDB Nasional hingga mencapai 13-14 %, namun anggaran pembangunan yang dialokasikan untuk sektor pertanian hanya sekitar 3 % dari APBN. APBN tersebut sangat dibutuhkan untuk membangun pertanian, terutama untuk mengatasi faktor kritis, yaitu penyediaan sarana-prasarana yang tidak diminati swasta atau tidak mampu disediakan oleh petani, pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pelayan pemerintah di bidang pertanian serta membantu mengatasi kegagalan pasar produk yang dihasilkan oleh petani. Sementara di sektor formal, pengembangan pertanian dan agribisnis mutlak memerlukan dukungan agar tercipta iklim berusaha yang kondusif melalui formulasi kebijakan dan pengamanan kebijakan fiskal dan moneter yang dikeluarkan Pemerintah. Namun pada kenyataannya, beberapa kebijakan Pemerintah yang ditetapkan selama ini kurang sepenuhnya berpihak pada sektor pertanian, seperti Harga Pembelian Pemerintah (gabah) yang hanya sedikit di atas biaya produksi, pengendalian harga penjualan (beras) agar tidak memicu kenaikan inflasi, pembebasan tarif bea masuk impor beberapa komoditas, serta pencegahan penyelundupan masuknya produk luar negeri belum berjalan maksimal. Di sisi lain, beberapa kebijakan yang sudah ditetapkan juga belum berjalan efektif di tingkat lapangan, seperti Harga Pembelian Pemerintah yang lebih rendah dari harga pasar atau sebaliknya harga produk petani seringkali berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah, terutama pada saat panen raya di daerah-daerah sentra produksi. Pemberlakuan tarif bea masuk impor yang dilaksanakan selama ini juga belum efektif dalam melindungi produk petani domestik. Komoditas impor sering membanjiri pasar dalam negeri dengan harga yang lebih murah karena pemerintah negara-negara eksportir melindungi petaninya dengan memberikan aneka subsidi dari hulu sampai hilir. Kondisi demikian mengakibatkan insentif yang diterima petani belum optimal sesuai dengan yang diharapkan, sehingga kurang mendorong gairah petani untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan usahatani.

Tantangan ke depan yang perlu dikembangkan adalah bagaimana membangun sistem perlindungan yang diberikan terhadap petani dan pelaku agribisnis secara lebih baik mulai dari aspek proses produksi sampai aspek pemasaran hasil melalui pola-pola promosi, asuransi, penjaminan maupun subsidi bunga kredit atau subsidi harga.

### 2.2.15 Kurang Optimalnya Kinerja dan Pelayanan Birokrasi Pertanian

Seperti kebanyakan institusi pemerintah pada umumnya, sumberdaya manusia aparat Pemerintah masih jauh dari memuaskan. Kondisi ini ditambah dengan penempatan aparat Pemerintah masih jauh dari memuaskan. Kondisi ini ditambah dengan sesuai dengan kompetensinya. Penyuluh yang merupakan ujung tombak pembangunan pertanian merupakan aparat Pemerintah Kabupaten/Kota, dimana sebagian besar Pemerintah Kabupaten/Kota kurang memberikan perhatian pada peningkatan kemampuan, fasilitas dan sarana kerja. Di sisi lain, organisasi Kementerian Pertanian tidak sesuai/pas dengan SKPD pertanian yang ada di daerah sehingga perlu diselaraskan. Dengan diterbitkannya PP No. 41 tahun 2007, maka terjadi perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk SKPD pertanian, nomenklatur ini tidak selaras dengan nomenklatur Eselon I di lingkup Kementerian Pertanian. Hal ini berdampak pada banyaknya Satuan Kerja (Satker) Kementerian di Daerah. Karena jumlah Satker sangat besar, maka sulit melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Akibatnya persentasi jumlah pelaporan yang masuk dan serapan anggaran APBN pertanian masih relatif rendah.

### 2.3 Tantangan Pembangunan Pertanian 2010-2014

Disamping permasalahan mendasar, pembangunan pertanian ke depan menghadapi berbagai tantangan yang menyangkut produksi dan produktivitas, penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang, infrastruktur lahan dan air, perbenihan/perbibitan, pembiayaan, pemenuhan kebutuhan pangan, *Millenium Development Goals* (MDGs), kebijakan harga, kelembagaan usaha ekonomi produktif, penyuluhan, citra pertanian, dan persaingan global.

#### Tantangan Pembangunan Pertanian

- 1) Memperbaiki produktivitas dan nilai tambah produk pertanian di beberapa sentra produksi dengan menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan.
- 2) Penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah.
- 3) Memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan.
- 4) Membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani/peternak kecil.
- 5) Pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan
- 6) Penciptaan *pricing policies* yang proporsional untuk produk-produk pertanian khusus.
- 7) Persaingan global serta pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global.
- 8) Memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus.
- 9) Memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif di perdesaan.
- 10) Menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif.
- 11) Pemenuhan kebutuhan pangan, disamping pengembangan komoditas unggulan hortikultura dan peternakan, serta peningkatan komoditas ekspor perkebunan.

### 2.4. Strategi Pembangunan Pertanian kedepan

Untuk merumuskan dan melaksanakan strategi pembangunan pertanian Indonesia mengingat tantangan (dan peluang) ke depan lebih kompleks dan saling berkait erat. Pembangunan pertanian Indonesia pada beberapa tahun ke depan masih akan dihadapkan pada beberapa isu mendasar dan tantangan baru yang merupakan dampak dari krisis finansial global, lonjakan harga pangan yang bersamaan dengan



lonjakan harga minyak bumi dunia. Sektor pertanian harus menghadapi faktor eksogen yang terkadang datang tiba-tiba, seperti: instabilitas atau fluktuasi harga pangan yang luar biasa tinggi, fenomena perubahan iklim yang mengacaukan ramalan produksi, serta variabilitas cuaca yang semakin tidak bersahabat.

Pada tingkat makro global, posisi negara-negara berkembang yang *nota bene* memiliki jumlah penduduk lebih besar dari negara-negara maju, masih belum dapat melepaskan diri dari permasalahan struktural dalam sistem produksi dan konsumsi, ketahanan pangan, kemiskinan, pengangguran, kualitas pendidikan dan lain-lain. Ditambah lagi, saat ini terdapat kecenderungan beberapa negara untuk semakin mementingkan urusan pangan dan pertanian di dalam negerinya sendiri, bahkan dengan menerapkan strategi proteksi yang cenderung berlebihan.

Kriteria keberhasilan suatu strategi kebijakan pembangunan pertanian sebenarnya tidak terlalu rumit, yaitu apakah terdapat peningkatan kesejahteraan petani atau belum; serta apakah sektor pertanian telah ditempatkan sebagai landasan pembangunan ekonomi yang bervisi kesejahteraan dan keberlanjutan dari pembangunan ekonomi itu sendiri.

Bagi Indonesia, apa pun tantangannya, strategi pembangunan pertanian dapat dikatakan berhasil apabila mampu berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak semata berorientasi pada peningkatan produksi fisik sekian macam komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan. Kriteria keberhasilan itu seharusnya dapat diukur dari perbaikan tingkat pendapat rumah tangga petani (dan pelaku di sektor lain), peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta perbaikan indikator makro seperti pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

Dalam kosa kata ekonomi, pembangunan pertanian dikatakan berhasil apabila telah mampu menjadi pengganda pendapatan (*income multiplier*) dan pengganda lapangan kerja (*employment multiplier*) bagi sektor perekonomian secara umum. Strategi pembangunan pertanian dikatakan telah berada pada jalur yang benar apabila sektor ekonomi yang sangat vital itu telah mampu menjadi stimulus bagi sektor-sektor lain dalam ekonomi untuk secara bersama-sama tumbuh dan berkembang sesuai dengan proporsi dan fase pembangunan ekonomi.

### 2.5. Prioritas Pembangunan Pertanian Pemerintah

Sampai pada kuartal pertama tahun 2010 ini, Pemerintah telah menyelesaikan empat prioritas penting, yaitu (1) penyusunan peraturan pemerintah tentang usaha pertanian komersial, (2) pencanangan usaha pangan skala luas (*food estate*), (3) cetak biru peningkatan nilai tambah dan daya saing industri pertanian berbasis pedesaan, dan (4) cetak biru swasembada pangan berkelanjutan. Berikut ini penjelasan singkat tentang prospek pencapaian dari keempat prioritas pemerintah tersebut.

Dua prioritas pertama sebenarnya lebih bersifat administratif-birokratis sebagai acuan untuk melaksanakan strategi "pengadaan lahan" di atas, yang telah dituangkan dalam suatu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Pertanian Komersial yang merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Pertanian. Masyarakat hanya berharap bahwa pelaksanaan dari PP 18/2010 itu tidak boleh terlalu gegabah mengabaikan agribisnis dan pertanian skala kecil, apalagi jika sampai menggusur.

Dalam kaitannya dengan investasi agribisnis bidang pangan skala luas (*food estate*) yang direncanakan di beberapa tempat seperti: di Merauke, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan mungkin di Kalimantan Tengah, saat ini yang diperlukan adalah kepastian acuan hukum dan kebijakan yang kondusif. Apabila hal ini diabaikan

maka hasil yang akan dicapai tidak akan sesuai harapan, bahkan tidak akan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Misalnya, struktur pertanian di Indonesia akan menjadi lebih timpang, kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam tersingkirkan, dan Indonesia akan memuai bencana yang lebih dahsyat.

Dua prioritas terakhir memang lebih banyak bersifat strategis dan akademis, sehingga mensyaratkan kedalaman analisis dan akurasi data yang digunakan. Kesalahan atau kealpaan memperhitungkan dua faktor penting tersebut, juga akan dapat menghasilkan kinerja sektor pertanian yang tidak secerah yang diharapkan. Peningkatan nilai tambah akan jauh lebih bermakna jika disesuaikan dengan proses transformasi dari keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif. Nilai tambah akan bervisi perbaikan kesejahteraan pelaku dan perbaikan ekonomi bangsa jika strategi yang disusun juga sejalan dengan perbaikan kapasitas pelaku dan peningkatan skala usaha. Strategi baru ini pasti mensyaratkan perbaikan penguasaan teknologi dan informasi pasar.

Maksudnya, sektor pertanian ke depan sangat memerlukan suatu strategi kebijakan dan langkah konkrit berupa pemberian insentif pajak, akses permodalan dan informasi bagi pelaku agribisnis yang akan melakukan investasi pada sektor pengolahan dan pemasaran di hilir. Di sinilah esensi peningkatan nilai tambah (*added value*) komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan akan sejalan dengan upaya peningkatan keunggulan kompetitif yang dimaksudkan di atas. Logikanya, investasi di sektor hilir tersebut pasti akan menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja terampil dan berpendidikan tinggi. Aktivitas ini akan menggairahkan ekonomi pedesaan, tanpa harus bekerja keras membendung arus urbanisasi yang terkadang didominasi tenaga tidak terampil dan berpendidikan rendah.

## 2.6. Strategi Swasembada Pangan Berkelanjutan

Strategi swasembada berkelanjutan bagi pangan strategis: beras, jagung, kedelai, gula, dan daging telah mulai menjadi agenda diskusi publik yang menarik. Pencapaian Indonesia dalam peningkatan produksi pangan strategis mungkin perlu diapresiasi, sekalipun masih terdapat kontroversi statistik dan metode penghitungan. Misalnya, angka resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa produksi beras pada 2009 mencapai 62,6 juta ton gabah kering giling atau meningkat 3,71 persen dari 60,3 juta ton produksi tahun 2008. Kecenderungan yang terus meningkat ini tentu sangat diharapkan untuk mendukung pencapaian swasembada berkelanjutan.

Karakter produksi beras yang sangat politis juga perlu menjadi perhatian berbagai pengampu kepentingan, karena sensitivitas komoditas pangan pokok ini terhadap beberapa keputusan politis, gejolak harga, manajemen stok, dan beberapa perubahan yang terlalu radikal. Opsi strategi peningkatan produksi wajib diteruskan, tidak setengah-setengah atau hanya bertumpu pada strategi perluasan areal panen (pencetakan sawah-sawah baru), tapi perlu bervisi peningkatan produktivitas per satuan lahan dan per satuan tenaga kerja atau dalam konteks peningkatan efisiensi teknis dan ekonomis sesuai dengan karakter setempat.

Produksi jagung tahun 2009 sekitar 17 juta ton, terutama karena peningkatan luas panen di beberapa sentra produksi jagung di Sulawesi dan Sumatera, terutama jagung hibrida yang juga menjadi input industri makanan ternak. Pada tahun 2010 produksi jagung juga masih diperkirakan meningkat, karena penggunaan benih unggul jagung hibrida semakin memasyarakat, dan bahkan cenderung telah menjadi kebutuhan petani. Di luar musim panen Indonesia harus mengandalkan jagung impor, maka tugas berat pemerintah menjadi lebih berat dalam stabilitas harga jagung. Jika

harga jagung domestik tidak stabil, maka lonjakan harga pakan ternak menjadi ancaman yang serius, karena subsektor peternakan unggas ini banyak melibatkan peternak skala kecil subsisten.

Opsi strategi peningkatan produksi jagung hibrida sebagai salah satu andalan baru pemenuhan konsumsi jagung yang terus meningkat perlu memperoleh dukungan dalam kebijakan pengelolaan air. Berhubung jagung hibrida ini memerlukan relatif banyak air, maka manajemen infrastruktur irigasi dan drainase menjadi hampir mutlak, agar tidak terjadi kejutan-kejutan persaingan faktor produksi dengan padi, kedelai dan palawija lainnya. Dukungan penelitian dan pengembangan (R&D) yang bervisi pada pengembangan protokol zonasi, sertifikasi dan standarisasi jagung hibrida akan sangat membantu mengurangi inefisiensi pada usahatani jagung.

Produksi kedelai tahun 2009 telah mendekati 701 ribu ton biji kering, suatu peningkatan signifikan dibandingkan angka produksi tahun 2008 yang hanya tercatat 590 ribu ton. Namun demikian, pada tahun 2010, prospek produksi kedelai tetap menghadapi tantangan berat karena faktor internal ekonomi dan kebijakan di dalam negeri sendiri. Sepanjang produksi dalam negeri masih berada jauh di atas konsumsinya, maka ketergantungan pada kedelai impor akan menjadi bom waktu yang membahayakan. Strategi peningkatan produksi kedelai perlu dilakukan melalui pengembangan benih unggul tahan kering, varietas kedelai dengan galur murni asli Indonesia, seperti kedelai hitam Varietas Cikuray, Mallika, dan lain-lain yang mampu mendukung pengembangan industri pangan, seperti kecap, industri kuliner dan sebagainya.

Jika Pemerintah tetap meneruskan kebijakan liberalisasi perdagangan kedelai dan memberlakukan tarif bea masuk rendah 0 %, maka dampak negatif yang ditimbulkannya adalah ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor yang makin besar. Ketika produksi di dalam negeri telah mampu mendekati tingkat konsumsinya, maka kebijakan proteksi dapat diterapkan, termasuk mengenakan tarif impor tinggi dan/atau kebijakan kuota sebagai implementasi pencadangan usaha untuk kemajuan industri mikro kecil dan koperasi. Hal yang perlu dikedepankan adalah upaya menjunjung tinggi prinsip kemitraan swasta besar, usaha mikro, kecil dan koperasi dalam kerangka persaingan usaha yang sehat.

Produksi gula tahun 2009 mencapai 2,84 juta ton yang masih cukup jauh dari total kebutuhan konsumsi gula di Indonesia yang diperkirakan mencapai 4,85 juta ton. Harga gula dunia yang melambung tinggi pada awal tahun 2010 ini seharusnya menjadi insentif tersendiri bagi pelaku ekonomi di sektor gula untuk meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Keputusan impor gula seharusnya dilandasi taktis-strategis yang jitu agar tidak mengganggu sistem insentif di atas. Manajemen harga gula di dalam negeri sebenarnya lebih banyak ditentukan oleh mitra dagang atau importir produsen (IP) untuk mengimpor gula mentah dan status importir terdaftar (IT) dengan 75 persen bahan baku berasal dari tebu petani. Empat BUMN masuk klasifikasi IT adalah: PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX, PTPN X, PTPN XI, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI).

Manajemen harga gula juga tergantung pada tingkah laku beberapa importir strategis dan pelaku industri gula rafinasi yang mulai menunjukkan perannya pada kinerja fluktuasi harga gula di dalam negeri. Langkah pencapaian swasembada gula dapat ditempuh dengan operasionalisasi revitalisasi pabrik gula dapat dilaksanakan misalnya, dengan pembentukan satu-dua perusahaan induk (*holding company*) pabrik gula yang terintegrasi dari kebun tebu di hulu sampai gula putih di hilir, dan yang memproduksi tebu di hulu sampai gula mentah di hilir. Langkah audit keuangan dan audit investigasi lainnya harus dilakukan secara menyeluruh dan akuntabel untuk

melalui apakah spesifikasi dan diversifikasi usaha seperti ini akan lebih baik atau tidak. Tingkat multiplier mata investasi bagi pembangunan ekonomi dan keberlanjutan investasi tidak akan terjadi apabila pertumbuhan kelembagaan atau kualitas jumlah negara masih rendah.

Produksi daging pada tahun 2000 masih berkisar 2,3 juta ton, dengan konsumsi daging ayam per pedaging yang demikian besar. Produksi daging sapi hanya 132 ribu ton, sehingga Indonesia tetap mengimpor sekitar 520 ekor sapi setiap tahun. Produksi daging sapi, daging ayam dan produk sektor peternakan atau yang menjadi sumber protein hewan di Indonesia sebenarnya tidaklah terlalu besar untuk memenuhi kebutuhan daging yang masih akan meningkat setiap tahun. Akibatnya, Indonesia masih harus menggunakan pada daging impor, terutama dari Australia. Selandia Baru dan negara lain yang bebas penyakit hewan, seperti penyakit mulut dan kuku, antraks, dan sapi gila. Di Indonesia, Revolusi Peternakan ditandai oleh berkembangnya industri ayam petelur, ayam pedaging, dan ayam kampung sendiri.

Tidak kalah pentingnya, industri pakan ternak yang umumnya terkait dengan investasi asing dan beroperasi dengan skala besar juga tumbuh pesat, yang ditandai dengan maju dan membaiknya tingkat efisiensi, bahkan di seluruh sistem agribisnis berbasis peternakan. Strategi peningkatan produksi daging dalam negeri dan perbaikan konsumsi daging sebagai salah satu sumber protein perlu berjalan bersamaan. Untuk daging sapi, strategi pengembangan agribisnis peternakan sapi potong Indonesia perlu terus menerapkan asas kelestarian (keseimbangan antara pemotongan dan jumlah populasi sapi potong atau menghindari "pengurusan" populasi), asas keberlanjutan (iklim usaha tetap kondusif dan tidak saling merusak), serta asas kemandirian (berkurangnya ketergantungan pada daging impor).

### 2.7. Penutup: Langkah ke Depan

Sebagai penutup, pembangunan pertanian juga wajib meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dan perikanan yang juga mampu menghasilkan devisa dari prioritas ekspor selama ini. Misalnya, kelapa sawit Indonesia masih akan terus merajai pasar dunia, yang kini memperoleh tantangan baru dalam visi keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup. Karet, kopi, kakao, dan lada Indonesia juga akan terus mampu menguasai pasar dunia. Komoditas perikanan tangkap dan budidaya seperti ikan tuna, cakalang, dan udang masih akan menjadi andalan ekspor dan perolehan devisa yang dapat menggerakkan perekonomian.

Strategi utama yang wajib dijalankan pada komoditas bernilai ekonomi tinggi tersebut adalah bagaimana caranya agar petani dan nelayan (skala kecil) juga mampu menerima manfaat ekonomis yang besar agar lebih bergairah dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensinya. Di sinilah strategi pemihakan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani menjadi sangat mutlak dan tidak dapat ditawar lagi.

Ke depan, strategi peningkatan produktivitas dan efisiensi itu wajib dikembangkan melalui aplikasi teknologi baru, yang dihasilkan melalui perjalanan panjang penelitian dan pengembangan (*R and D*), serta penelitian untuk pengembangan (*R for D*). Dunia usaha dan sektor swasta Indonesia secara umum perlu secara nyata melaksanakan kemitraan strategis dengan perguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian pangan, yang sebenarnya tersebut di segenap pelosok Indonesia. Hanya dengan *R-and-D* dan *R-for-D* inilah, inovasi baru akan tercipta, sehingga daya saing Indonesia akan meningkat berlipat-lipat. Dunia usaha atau sektor swasta dapat pula untuk menjadi aktor terdepan dalam mengembangkan diversifikasi pangan, terutama yang berbasis pemanfaatan teknologi dan industri pangan.

Diversifikasi pangan yang berbasis kearifan dan budaya lokal akan sangat kompatibel dengan strategi pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang sesuai dengan kondisi demografi Indonesia yang plural heterogen. Dalam hal ini, langkah pengembangan teknologi dan industri pangan disesuaikan dengan kandungan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.

Sumber : Bustanul Arifin, 2010. Artikel Strategi Pembangunan Pertanian Indonesia. Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010- 2014